



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir, Nabire, 17 Februari 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha bengkel motor, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Nabire. Nomor *Handphone* XXXXX dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXX@gmail.com. Dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Orang Tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 13 Juli 2023 Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Nbr Pemohon telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON binti PEMOHON (Umur 17 tahun) dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON bin AYAH/ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PEMOHON (Umur 19 tahun) ;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum

Hal 1 dari 19 Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama 3 bulan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami dan calon istri telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan calon pengantin wanita bernama ANAK PEMOHON binti PEMOHON berumur 17 tahun dan calon pengantin laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON bin AYAH/ ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PEMOHON berumur 19 tahun 11 bulan;

5. Bahwa, antara anak Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusutan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor:XXXXX, tanggal 13 Juli 2023, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah serta telah akil balig dan sudah siap untuk seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus Jejak/belum pernah menikah telah siap untuk menjadi seorang suami dan/ kepala rumah tangga;

Hal 2 dari 19 Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, saat ini calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON bin AYAH/ ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PEMOHON saat ini telah bekerja sebagai karyawan sawmill kayu dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);

9. Bahwa, keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa, agar pernikahan bernama ANAK PEMOHON binti PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON bin AYAH/ ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PEMOHON dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON binti PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON bin AYAH/ ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Orang Tua calon suami anak Pemohon, menghadap di persidangan;

Hal 3 dari 19 Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Orang Tua calon suami anak Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terhadap anak Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan, berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 Tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Orang Tua calon suami anak Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa adanya perubahan ataupun tambahan;

Menimbang bahwa kemudian Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Orang Tua calon suami anak Pemohon di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon (Ayah/ orangtua anak) Agama Islam, Tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Nabire, menerangkan;
 - o Bahwa mereka adalah Ayah Kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama ANAK PEMOHON binti PEMOHON ;
 - o bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami berstatus Jejaka;
 - o bahwa anak Pemohon (Umur 17 tahun) sekarang belum/tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD);
 - o Bahwa anak Pemohon kurang lebih sekitar 3 bulan telah menjalin cinta dengan calon suami bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON bin AYAH/ ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PEMOHON (19 tahun);
 - o bahwa anak Pemohon dan calon suami mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Pemohon;

Hal 4 dari 19 Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o bahwa anak Pemohon dan calon suami menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- o bahwa anak Pemohon dan calon suami menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- o bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setiap bulan;
- o bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran/saling suka dan sering keluar rumah bersama kurang lebih 3 bulan lamanya , serta untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- o bahwa ia selaku orangtua anak yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
- Ayah & Ibu/Orang Tua calon suami anak Pemohon mengaku bernama AYAH/ ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PEMOHON & IBU/ ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PEMOHON, agama Islam, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Nabire, menerangkan;
 - o bahwa mereka adalah Ayah & Ibu Kandung /Orang Tua calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON bin AYAH/ ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
 - o bahwa calon suami anak Pemohon berstatus Jejak sedangkan anak Pemohon berstatus perawan;
 - o bahwa anak Pemohon (Umur 17 tahun) sekarang belum/tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa anak Pemohon kurang lebih sekitar 3 bulan telah menjalin cinta dengan calon suami bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON bin AYAH/ ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PEMOHON (19 tahun);
- o bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Pemohon;
- o bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- o bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- o bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setiap bulan;
- o bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon telah berpacaran/saling suka dan sering keluar rumah bersama kurang lebih 3 bulan lamanya , serta untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- o bahwa mereka selaku Ayah & Ibu /Orang Tua calon suami anak Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
- Anak Pemohon mengaku bernama ANAK PEMOHON binti PEMOHON , umur 17 tahun , agama Islam, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Nabire, menerangkan:

Hal 6 dari 19 Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o bahwa ia adalah anak Pemohon dan telah mempunyai hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON bin AYAH/ ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- o bahwa ia berstatus perawan dan calon suaminya tersebut berstatus Jejaka;
- o bahwa anak Pemohon (Umur 17 tahun) sekarang belum/tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD);
- o Bahwa ia kurang lebih sekitar 3 bulan telah menjalin cinta dengan calon suami bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON bin AYAH/ ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- o bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan calon suami yang diajukan oleh orangtuanya (Pemohon);
- o bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- o bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- Calon suami anak Pemohon mengaku CALON SUAMI ANAK PEMOHON bin AYAH/ ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PEMOHON, 19 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Nabire, menerangkan:
 - o bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon dan telah mempunyai hubungan cinta dengan perempuan yang bernama ANAK PEMOHON binti PEMOHON ;
 - o bahwa ia berstatus Jejaka sedangkan anak Pemohon tersebut berstatus perawan;
 - o Bahwa ia kurang lebih sekitar 3 bulan telah menjalin cinta dengan ANAK PEMOHON binti PEMOHON , (Umur 17 tahun) ;
 - o bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan seorang anak yang diajukan oleh orangtua/Orang Tuanya (Pemohon);

Hal 7 dari 19 Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- o bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- o bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- SURAT-SURAT:

1. Fotokopi Surat Penolakan, Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, tanggal 13 Juli 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi KTP, atas nama PEMOHON yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi KTP, atas nama AYAH/ ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi KTP, atas nama Siti Qomariyati yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi KTP, atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);

Hal 8 dari 19 Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi KTP, atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6)

7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 9104XXXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 08 Februari 2023 bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 9104XXXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 25 Oktober 2018 bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 28 Juni 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.9);

10. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon (ANAK PEMOHON) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri InpresXXXXX, tanggal 12 Juni 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (bukti P.10);

• **SAKSI-SAKSI:**

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Nabire, di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah:

o bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon ;

o bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama ANAK PEMOHON binti PEMOHON hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON bin AYAH/ ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Hal 9 dari 19 Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus Jejaka;
- o bahwa anak Pemohon (Umur 17 tahun) sekarang belum/tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD);
- o bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setiap bulan;
- o bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran kurang lebih sekitar 3 bulan dan, serta untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Nabire, di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah;

- o bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- o bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama ANAK PEMOHON binti PEMOHON hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON bin AYAH/ ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- o bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami berstatus Jejaka;
- o bahwa anak Pemohon (Umur 17 tahun) sekarang belum/tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD);
- o bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setiap bulan;
- o bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;

Hal 10 dari 19 Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran kurang lebih sekitar 3 bulan dan , serta untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi di persidangan, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2006 beserta penjelasannya angka 3 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pemohon mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama, dan berdasarkan alat bukti dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan/atau orangtua/Orang Tua calon anak berdomisili di wilayah Kabupaten Nabire, maka Pemohon dinilai berkapasitas dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Nabire (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, halaman 138, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019) dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Orang Tua calon

Hal 11 dari 19 Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terhadap anak Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan, berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 Tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Orang Tua calon suami anak Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya (Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON binti PEMOHON (Umur 17 tahun) dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON bin AYAH/ ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Orang Tua calon suami anak Pemohon di persidangan, yang menurut penilaian Hakim bahwa keterangan mereka bersesuaian dan saling mendukung hal-hal yang mendesak agar dilaksanakannya perkawinan terhadap anak tersebut (Pasal 13, 14, dan 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.1 sampai dengan P.10) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Pasal 1888 KUHPerdara) dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat:

Hal 12 dari 19 Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o P.1 berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire Kabupaten Nabire, membuktikan bahwa Pemohon telah beriktikad baik untuk melaksanakan pernikahan anaknya di bawah pengawasan dan pencatatan KUA setempat;
- o P.2-P.8 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Domisili, dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Anak Pemohon, dan Calon Suami Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah cq. Kepala Dinas/Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, membuktikan bahwa Pemohon, dan Anak Pemohon berkedudukan dan berdomisili di wilayah Kabupaten Nabire;
- o P.9 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas/Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON binti PEMOHON adalah benar anak Pemohon;
- o P.10 berupa Ijazah atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Inpres 02 Kalisemen, membuktikan bahwa Pendidikan Terakhir anak Pemohon adalah Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah dewasa, tidak termasuk kelompok yang tidak dapat didengar keterangannya, telah disumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri, maka saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi (Pasal 171, 172 dan 175 RBg) dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan materiil sebagai saksi (Pasal 307 dan 309 RBg) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Orang Tua calon suami anak

Hal 13 dari 19 Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- o bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON binti PEMOHON telah mempunyai hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON bin AYAH/ ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- o bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus Jejaka;
- o bahwa anak Pemohon sekarang masih belum/tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD);
- o bahwa anak Pemohon (Umur 17 tahun) kurang lebih sekitar 3 bulan telah menjalin cinta dengan calon suami bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON bin AYAH/ ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PEMOHON (19 tahun);
- o bahwa anak Pemohon dan calon suami mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Pemohon;
- o bahwa anak Pemohon dan calon suami menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melaksanakan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- o bahwa anak Pemohon dan calon suami menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- o bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setiap bulan;
- o bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran/saling suka dan sering keluar rumah bersama kurang lebih 3 bulan, serta untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

Hal 14 dari 19 Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o bahwa orangtua anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orangtua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
- o bahwa Pemohon telah beriktikad baik untuk melangsungkan pernikahan di bawah pengawasan dan pencatatan Kepala Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak dengan bukti Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik setempat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON bin AYAH/ ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PEMOHON hanya kurang satu syarat yaitu anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan) sementara persyaratan lainnya, termasuk antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan, telah terpenuhi (Pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk memelihara kesehatan dan keturunan suami isteri;

Hal 15 dari 19 Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat perkawinan, hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap dan mampu melaksanakan tindakan hukum (termasuk perkawinan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam / mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi perempuan), dan seorang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, anak Pemohon dapat dikategorikan sudah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dapat dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum positif dan hukum yang hidup di tengah masyarakat, mukallafnya seorang anak yang ditandai dengan aqil dan baligh tersebut harus pula disertai kemampuan lahir dan batin, bagi calon suami harus siap sebagai kepala keluarga dengan ditandai menyayangi isteri/keluarga dan telah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setiap bulan, dan bagi seorang calon isteri harus siap sebagai ibu rumah tangga yang baik dengan ditandai menghormati dan menjaga harta suami/keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, namun anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta

Hal 16 dari 19 Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan timbulnya mafsadat yang lebih besar, maka anak Pemohon dengan calon suaminya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua/Orang Tua masing-masing calon mempelai bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989);

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan, dan pihak keluarga khawatir jika mereka tidak dikawinkan akan timbul fitnah dan mafsadah yang lebih besar di kemudian hari, hal tersebut merupakan alasan yang sangat mendesak dan dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa, maka untuk menghindari hal tersebut, anak Pemohon dengan calon suami harus segera dinikahkan (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya);

Hal ini sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah, dan diambil sebagai pendapat Hakim, yaitu:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“aturan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan (kebaikan)”

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal 17 dari 19 Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"mencegah mafsadah (kerusakan) lebih didahulukan daripada menarik masalah (kebaikan)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk efektivitas penetapan ini, berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire Kabupaten Nabire, tanggal 13 Juli 2023, maka Hakim patut untuk memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire Kabupaten Nabire untuk melakukan pengawasan dan pencatatan pernikahan terhadap anak yang telah diberikan dispensasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON binti PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON bin AYAH/ ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,- (*seratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1445 Hijriah, oleh **IKBAL FAHRI HASAN, S.H.**

Hal 18 dari 19 Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim, dengan dibantu oleh **BAHARUDIN, S.H.I** sebagai Panitera
dengan diri oleh Pemohon.

Panitera

Hakim

BAHARUDIN S.H.I

IKBAL FAHRI HASAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBPNP : Rp. 10.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp.110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)